

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN POPULASI BUAYA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LINGGA

Jumaryati¹, Jamhur Poti², Okparizan³
E-mail : jumaryatianwar@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Wildlife in the form of a crocodile in Lingga Regency is one of the predators that often raises itself to the surface of rivers and swamps so that many people become victims of these wild animals. Crocodile in Lingga including estuarine crocodile type or often called the crocodile crocodile (Crocodylus Porosus) where this is the largest type of crocodile in the world. The purpose of this study was to determine the implementation of the crocodile population control policy by the Lingga Regency Environmental Agency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The data analysis technique in this study uses triangulation techniques. In implementing this crocodile population control policy the researchers used 4 indicators from G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli's theories. The results of this study with 9 informants indicated that the environmental conditions of the crocodile shelter were strategic because they were far from residential areas. Judging from the relationship between the organizations implementing the policy has been implemented well but communication to the community is still lacking. In terms of resources, the implementation of this program has been carried out but there is still a lack of experts in handling cases of crocodile population control. Judging from the characteristics and capabilities of the implementing agent, the policy implementers are indeed experts in dealing with crocodiles and there has been training given previously from the agency. The conclusion is that the implementation of the crocodile population control policy in Lingga Regency has not been maximized and there are still many technical and operational constraints faced by the implementers in the field or the implementers of the policies that have not yet fully benefited the community. At the end of this study, it is suggested that if tangible benefits have not been felt by the community, such a program should be reviewed so that it can be actualized properly and provide tangible benefits for the community.

Keywords: implementation, control, wildlife

I. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara “*mega biodiversity*” yaitu negara yang punya keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Diberbagai wilayah Indonesia banyak sekali terdapat satwa liar yang berkeliaran di darat maupun di air. Masing-masing satwa liar ini bisa berkembang biak dimana saja yang ia inginkan. Perkembangan satwa liar banyak dimanfaatkan oleh manusia

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

dan digunakan untuk meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Akan tetapi, satwa liar juga bisa menimbulkan masalah bagi manusia, seperti: kerusakan bangunan, penyakit dan juga dapat mengganggu keselamatan manusia.

Satwa liar adalah jenis hewan yang memiliki sifat-sifat liar baik yang hidup di alam bebas maupun hewan yang dipelihara manusia. Ada banyak sekali satwa liar yang hidup dan berkembang di sekitar kita, contohnya: buaya, ular, tupai, elang, kura-kura, dll. Di Indonesia terdapat empat jenis buaya yaitu *Tomistoma schlegelii*, *Crocodylus siamensis*, *Crocodylus Novaeguineae* (dilindungi berdasarkan SK Mentan No 327/Kpts/Um/5/1978) dan *Crocodylus Porosus* (dilindungi). Keempatnya berdasarkan SK Mentan No 716/Kpts/Um/105/1980 kemudian dilindungi berdasarkan PP RI No. 7 Tahun 1999. Berdasarkan surat keputusan tersebut pemanfaatan semua jenis buaya di Indonesia harus seizin Menteri Kehutanan Indonesia.

Di suatu daerah tepatnya di Kabupaten Lingga ada beberapa satwa liar yang memang sangat meresahkan warga sekitar. Salah satunya ialah buaya yang selalu menelan banyak korban jiwa. Ada beberapa titik sungai di Lingga yang menjadi tempat habitat nya para buaya ini. Lokasi-lokasi itu diantaranya di Desa Panggak Laut 2 titik, Mepar 2 titik, Kerandin 2 titik dan Sungai Pinang 2 titik. Hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang ini semakin tahun populasinya semakin meningkat dan meresahkan warga. Keganasan buaya ini membuat para nelayan harus selalu waspada agar tidak menjadi mangsa buaya lagi. Buaya di Lingga termasuk jenis buaya muara atau sering disebut dengan buaya katak (*Crocodylus Porosus*) dimana ini adalah jenis buaya terbesar di dunia. Hewan buas satu ini sangat mudah dijumpai oleh masyarakat sekitar dikarenakan sering berjemur di tepian sungai maupun di bibir pantai di Daik Lingga.

Meningkatnya populasi buaya tidak hanya berdampak pada mata pencaharian nelayan saja, tetapi berdampak juga bagi para pengunjung pantai yang sedang berlibur. Buaya yang sering tenggelam timbul di salah satu tempat wisata membuat para pengunjung tidak ada lagi yang berani mandi di pantai tersebut. Saat ini predator tersebut tidak hanya ada di sungai hulu saja, tetapi sudah banyak yang berkeliaran di sepanjang aliran sungai di Lingga. Bahkan dipastikan saat ini masih banyak buaya-buaya yang berukuran kecil dan besar yang berkeliaran di sekitar sungai dan rawa-rawa di Lingga. Hingga saat ini hewan berbahaya di Lingga ini belum bisa dipastikan jumlah keseluruhannya oleh pemerintah.

Tabel 1. Data Korban Serangan Buaya

No	Tempat Kejadian	Tahun	Nama Korban	Keterangan
1.	Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur	2014	Ijal	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
2.	Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur	2015	Awang	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
3.	Desa Kelumu Kecamatan Lingga	2015	Putri	Dimakan buaya (korban meninggal)
4.	Desa Mepar Kecamatan Lingga	2015	Arsan	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
5.	Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur	2016	Saleh	Dimakan buaya (korban meninggal)

6.	Kelurahan Daik Kecamatan Lingga	2017	Sepet	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
7.	Desa Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara	2017	Edi Warman	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
8.	Desa Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara	2017	Iskandar	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
9.	Desa Mepar Kecamatan Lingga	2018	Azman	Dimakan buaya (korban meninggal)
10.	Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur	2018	Mujiono	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
11.	Kelurahan Daik Kecamatan Lingga	2018	Edar	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
12.	Kelurahan Daik Kecamatan Lingga	2018	Edi	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)
13.	Desa Mepar Kecamatan Lingga	2019	Arasi	Dikibas buaya (korban selamat)
14.	Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur	2019	Herman	Dikibas buaya (korban selamat)
15.	Desa Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara	2019	Salman	Digigit buaya (korban luka-luka, tetapi selamat)

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, 2020

Data yang sudah diolah oleh Dinas tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lingga. Untuk tahun 2019 ini tidak ada korban serangan dari buaya muara tersebut. Akan tetapi, buaya-buaya masih sering memunculkan dirinya di tepian sungai, di pantai untuk berjemur dan nelayan pun masih merasa kurang nyaman saat menangkap ikan di laut. Masih seringnya warga membuang isi perut ikan, ayam dan bangkai lainnya ke sungai-sungai sehingga itu semua memancing para buaya untuk menampakkan dirinya di area sungai.

Untuk mengamankan dan mengurangi populasi buaya di Lingga, pada tahun 2016 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga memutuskan untuk membuat suatu tempat penampungan bagi buaya yang sudah di tangkap oleh masyarakat Lingga. Akan tetapi, banyak dari masyarakat sekitar yang mengatakan tempat itu tidak dimanfaatkan selayaknya. Ukuran tempat penampungan yang kurang memadai tersebut membuat sebagian dari masyarakat yang menjumpai dan bisa menangkap buaya muara itu langsung membunuh dan membelah buaya tersebut.

Tempat penampungan yang sudah beberapa tahun dibangun oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga tersebut akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga pada akhir tahun 2018 lalu dikarenakan Dinas Pertanian dan Kehutanan tersebut sudah dipindahkan ke Provinsi dan baru diaktifkan kembali mulai awal tahun 2019. Untuk biaya pengeluaran kontak dan rehabilitasi kandang Dinas mengeluarkan biaya sebesar Rp. 79.700.000,00 dan kemudian untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya gangguan satwa liar ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup menyusun suatu program pengelolaan dan pengendalian. Program tersebut dinamai dengan “Program Pengendalian Satwa Liar Dengan Pembentukan Satgas (Satuan tugas)”. Program tersebut dibuat dengan harapan bisa mengurangi jumlah populasi buaya yang ada di Lingga.

Dalam pengendalian satwa liar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengendalian biologis dan mekanis. Pengendalian biologis dilakukan dengan cara mengurangi populasi atau perbaikan habitat satwa liar, sedangkan mekanis dilakukan dengan cara membuat penghalang agar satwa liar terbatas pergerakannya.

Setelah adanya tempat penampungan buaya ini, beberapa buaya yang ada di penampungan tersebut dikirim ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau Seksi Wilayah II Batam dan kemudian mereka titipkan di penangkaran buaya terbesar di Kepri yaitu PT Perkasa Jagad Karunia (PJK) di Pulau Bulan Kota Batam. Tetapi nyata nya sampai saat ini tetap saja buaya di Lingga semakin menjadi-jadi dan susah untuk diatasi sehingga tiap tahun nya pasti ada kasus buaya menelan korban jiwa.

Di tahun 2019 pada bulan Maret yang lalu pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pengiriman buaya sebanyak 71 ekor buaya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau Seksi Wilayah II Batam . Dan pada bulan Oktober 2019 tenaga ahli dibantu oleh masyarakat sekitar berhasil menangkap 1 ekor buaya dan dimasukkan ke tempat penampungan sementara buaya yang di Desa Panggak Laut. Dalam proses penangkapan, Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki tenaga ahli/pawang buaya dan juga satgas yang sudah di SK kan dari dinas tersebut.

Untuk penangkapan buaya yang ukuran nya kecil, tenaga ahli yang bekerja dan dibantu oleh satgas untuk menangkap anak-anak buaya yang ada di titik-titik kemunculan buaya. Sedangkan untuk buaya yang besar mereka tangkap dengan menggunakan jerat yang sudah disiapkan dengan umpan beberapa ekor tupai. Untuk proses pengiriman ke Batam pihak dinas tidak memiliki urusan lagi, karna itu sudah tanggung jawab dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau Seksi Wilayah II Batam yang langsung mengambil buaya-buaya tersebut dari Lingga.

Dalam penanganan pengurangan populasi buaya ini, satuan tugas yang bertugas sudah memiliki Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan langsung ditanda tangani Bupati Lingga. Satuan tugas ini bekerja secara menyeluruh, baik itu menjadi pawang maupun yang mengelola tempat penampungan di Desa Panggak Laut.

Tabel2. Data Nama Satuan Tugas

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Wakil Ketua
3.	Kasi Pemeliharaan Lingkungan dan Kehutanan	Anggota
4.	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Anggota

5.	Kasi Operasional Dan Pengendalian Satpol PP	Anggota
6.	Abdul Malik, S.Pd. DS / BPBD	Anggota
7.	Guruh Maha Putra / BPBD	Anggota
8.	Mahmud / Kelurahan Daik	Anggota
9.	Khairul / Kelurahan Daik	Anggota
10.	Sabran / Desa Kudung	Anggota
11.	Zulhardi / Desa Sungai Pinang	Anggota
12.	Supiza / Desa Sungai Pinang	Anggota
13.	Mahmud / Desa Pekaka	Anggota
14.	Irwanda / Desa Mentuda	Anggota
15.	Tarmizan / Desa Kerandin	Anggota
16.	Oo Sarkosi / Desa Bukit Langkap	Anggota
17.	Sapar / Desa Panggak Laut	Anggota
18.	Sahrel / Desa Sungai Besar	Anggota
19.	Herdiyanto / Desa Mepar	Anggota
20.	Romawi / Desa Kelumu	Anggota

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, 2020

II. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005). Alasan peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena jenis penelitian ini menggambarkan secara langsung fenomena yang sudah terjadi dan penelitian ini tidak memerlukan data angka yang diperhitungkan.

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data skunder dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara,

studi kepustakaan, dan penelusuran data online. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Bidang Pemeliharaan Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Lingga	1
2.	Satgas Dinas Lingkungan Hidup	2
3.	Masyarakat	6
Total		9

Sumber: diolah oleh peneliti, 2020

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengendalian Populasi Buaya Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. Penelitian skripsi oleh Bayu Yustisianto Ekapaksi (2019) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gajah Liar Di Taman Nasional Way Kambas” menyimpulkan bahwa, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar dan Kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, berfokus pada model implementasi kebijakan diantaranya ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas pada tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi belum terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh, tahap saat gangguan gajah liar terjadi sudah berjalan dengan baik dan tahapan setelah gangguan gajah liar terjadi sudah berjalan dengan baik.
2. Penelitian skripsi oleh Arif Wibowo, I Gusti Ayu K.R.H, Al. Sentot Sudarwanto (2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar Di Provinsi Jambi (Ditinjau Dari Hukum Dan Kebijakan Publik)”. Menyimpulkan bahwa, konflik manusia dan satwa liar terjadinya karena gangguan, ancaman atau ketidaknyaman yang diakibatkan oleh satwa akibat perbuatan sehubungan dengan ketidakseimbangan ekosistem karena kerusakan hutan. Beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara manusia dengan satwa liar seperti perladangan dalam kawasan hutan baik yang lama maupun baru, *Illegal Logging* di beberapa kawasan hutan, perluasan lahan perkebunan baik oleh perusahaan maupun masyarakat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan satwa liar yang ada di wilayah tersebut. Perburuan terhadap satwa

mangsa/perburuan yang berlebihan, ketidaktersediaan makanan yang cukup bagi kelangsungan hidup satwa liar di dalam hutan dan pembukaan wilayah hutan untuk pengusahaan pertambangan. Berbagai upaya dalam implementasi kebijakan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT di daerah, untuk memperoleh hasil yang tepat, cepat, efektif dan efisien telah dilakukan kegiatan diantaranya adalah dengan mengadakan penyuluhan, perlindungan dan patroli kawasan, Pengusiran/ penghalauan satwa liar kembali ke habitatnya, penangkapan satwa liar yang mengganggu untuk dievakuasi ke lokasi habitatnya yang aman. Penyelamatan satwa liar yang bermasalah (terjerat/ terluka).

3. Penelitian skripsi oleh oleh Stevi Bataren Patar Rumapea Burhanuddin Kiyai (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara menyimpulkan bahwa, Pemerintah Sulawesi Utara membuat sebuah peraturan guna menekan angka kriminalitas yang diakibatkan oleh pengguna alkohol. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Penetapan aturan ini bukan berarti mengekang kebebasan tapi bertujuan membuat sebuah dasar acuan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol demi kemajuan Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana seluruh Pemerintahan yang ada di kabupaten/kota harus menerapkannya atau melaksanakannya peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No 14 tahun 2016 mengenai Retribusi Perizinan Tertentu dimana di dalamnya mengatur perizinan untuk menampung dan mengedarkan minuman beralkohol. Namun, tingkat pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah, walaupun ada beberapa daerah yang concern dengan permasalahan minuman keras ini, seperti mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, namun masih banyak mengalami kendala, sehingga tujuan untuk meminimalisir gangguan Kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini nampaknya belum dapat dikatakan berhasil.
4. Penelitian skripsi oleh Oki Oktami Yuda & Eko Priyo Purnomo (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017 menyimpulkan bahwa, Hasil dari analisis data diketahui implementasi kebijakan dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Adapun hasil dari implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari sasaran utama capaian kinerja tahun 2017 mencapai 99.60%, penggunaan anggaran yang efisien, sarana dan prasarana yang sudah memadai, Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas serta adanya dorongan dari lembaga swadaya masyarakat yang secara tidak langsung membantu dalam proses pelaksanaan, komunikasi yang informatif kepada pihak manajemen hotel, adanya koordinasi dengan stakeholder terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pihak hotel. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian masih minimnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi terhambat.

Dilihat dari bacaan studi literatur diatas, terdapat berbagai aspek perbedaan mengenai implementasi kebijakan diantaranya lokasi penelitian yang berbeda, fokus penelitian yang berbeda, teori dan konsep yang digunakan berbeda. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengendalian Populasi Buaya Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga dimana sangat penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dari pemerintah Kabupaten

Lingga ini sudah terlaksana dan bagaimana cara pemerintah menangani masalah yang membuat timbulnya keresahan bagi masyarakat khususnya warga Daik Lingga.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono 2008). Implementasi Kebijakan dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya, Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana.

Implementasi Kebijakan Pengendalian Populasi Buaya Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga

Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Lingkungan Hidup telah membuat suatu kebijakan dalam hal menangani kasus satwa liar yaitu buaya muara yang selama ini selalu membuat warga resah apalagi saat banjir naik ke halaman-halaman rumah warga. Ditambah lagi dengan adanya beberapa korban akibat serangan buaya pihak dinas akhirnya membentuk suatu program yaitu “Pengendalian Satwa Liar Dengan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)”.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di tepian sungai. Para pelaksana kebijakan ini bekerja mencari dan mengamankan buaya hanya pada titik-titik kemunculan buaya di Kabupaten Lingga saja. Titik kemunculan buaya di Kabupaten Lingga menjadi sasaran utama bagi pelaksana kebijakan, lokasi-lokasi itu diantaranya di Desa Panggak Laut 2 titik, Mepar 2 titik, Kerandin 2 titik dan Sungai Pinang 2 titik. Pelaksana kebijakan bekerja apabila dalam keadaan tertentu saja yang seharusnya di dalam Surat Keputusan, satuan tugas ini bekerja sebulan sekali untuk mengawasi dan mengatasi kejadian buaya. Satuan tugas juga diberikan formulir yang disediakan dinas untuk mencatat semua kejadian buaya yang dilihat oleh setiap satuan tugas.

Implementasi program dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari program yang pemerintah buat dan kendala apa saja yang ditemui dalam pencapaian program ini supaya menjadi pembelajaran untuk masa yang akan datang. Walaupun sebagian masyarakat Lingga tidak mengetahui program pengendalian buaya yang sudah ada sejak awal 2019 ini, akan tetapi saat peneliti turun ke lapangan dan memberitahu tentang program yang sudah berjalan kepada masyarakat, mereka menyetujui tindakan pemerintah yang tidak tinggal diam dengan melihat situasi buaya sekarang yang selalu menyerang warga yang sedang beraktivitas di sungai maupun laut dan juga lingkungan sekitar tempat penampungan buaya didirikan pun masyarakat desa menyetujui karena dianggap lokasi tersebut sudah cukup strategis untuk mengamankan buaya karena jauh dari rumah warga.

Ada juga beberapa daerah Kabupaten Lingga tidak ingin diawasi oleh pelaksana kebijakan, salah satunya desa Marok Kecil dikarenakan mereka mempunyai keahlian tersendiri dalam menangani kasus buaya. Saat ada kejadian pun masyarakat di desa tersebut tidak pernah melapor ke pelaksana kebijakan. Satuan tugas yang bekerja tidak memiliki tunjangan dalam keselamatan kerja, bahkan gaji yang diperoleh setiap anggota satuan tugas terbilang rendah, yaitu sebesar Rp. 275.000,00. Padahal resiko para pelaksana kebijakan ini sangat besar, akan tetapi kurangnya perhatian pemerintah membuat keluarga para pelaksana kebijakan ini merasa kurang nyaman. Pada tahun 2020 satuan tugas diberikan Surat Keputusan (SK) terbaru yang dikeluarkan oleh bupati, setelah Surat Keputusan keluar para pelaksana kebijakan baru boleh turun kelapangan dengan memantau langsung lokasi titik kemunculan buaya. Untuk tahun ini, buaya liar yang terlebih dahulu menjadi sasaran dari pelaksana kebijakan dan juga nantinya satuan tugas di Kabupaten Lingga juga dibantu oleh petugas ahli dari Badan Konservasi Wilayah II Kota Batam (BKSDA) untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat di lokasi.

Pihak dinas selalu berusaha untuk tetap menjaga komunikasi dengan para pelaksana kebijakan, akan tetapi tidak dengan masyarakat. Kurangnya komunikasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui keberadaan satuan tugas pengendalian buaya ini, dan siapa-siapa saja orang yang termasuk kedalam organisasi tersebut. Sehingga saat ada korban, masyarakat mengira yang bekerja hanya Polisi, Tni, BPBD, dan juga dibantu organisasi masyarakat lainnya. Menurut penuturan dari para korban serangan buaya, pemerintah tidak banyak mengambil tindakan apabila terjadi kasus buaya menelan manusia, mereka hanya sekedar mencari dan apabila tidak jumpa setelah beberapa hari kasus tersebut akan hilang begitu saja. Pemerintah juga tidak ada memberikan sumbangan atau bantuan kepada korban. Pemerintah hanya mendata nama-nama korban untuk dijadikan laporan kepada atasan.

Dengan menganalisis permasalahan yang muncul perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut sesuai dengan variabel dan indikator yang sudah ada, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menganalisa penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana implemmentasi program pengendalian satwa liar ini dijalankan, maka peneliti menggunakan teori yang dipaparkan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono 2008) yaitu:

a. Kondisi Lingkungan

Pengukuran kondisi lingkungan yang dimaksud disini berhubungan dengan apakah lingkungan tempat kebijakan ini dilakukan yaitu Kabupaten Lingga menerima kebijakan yang sudah pemerintah buat dan apakah lingkungan tempat penampungan buaya ini juga diterima dikalangan masyarakat desa tersebut. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pelaksana program, walaupun awalnya kebanyakan dari masyarakat Lingga tidak mengetahui ada program ini, akan tetapi setelah diberitahukan masyarakat Kabupaten Lingga sangat mendukung dan menerima adanya program pengendalian buaya dengan harapan pemerintah Lingga bisa lebih memperhatikan masyarakat apalagi para nelayan yang mayoritasnya di laut sering menjumpai dan bahkan sampian yang mereka gunakan pun sering dikibas oleh buaya. Masyarakat siap membantu para pelaksana kebijakan apabila ada kasus buaya menyerang manusia lagi. Seperti tahun 2020 ini setelah Surat Keputusan (SK) keluar, satuan tugas akan turun langsung ke delapan titik kemunculan buaya dengan diawasi petugas ahli dari Badan Konservasi Wilayah II Kota Batam (BKSDA) dimana satuan tugas disana akan dibantu juga oleh masyarakat yang tinggal di desa sekitar untuk mengamankan buaya.

Begitupun dengan masyarakat desa Panggak Laut, tidak ada penolakan dari mereka untuk pihak dinas membangun tempat penampungan di daerah tersebut. Warga desa pun bahkan ada yang memberi makan buaya yang ada di lokasi tempat penampungan. Lokasi tempat penampungan tersebut cukup strategis karena jauh dari rumah warga, akan tetapi jarak tempat penampungan dengan kantor desa hanya 300 meter saja dan area tempat penampungan tersebut juga berbau amis. Bahkan didalam kandang banyak terdapat sampah-sampah plastik yang berserakan. Pihak dinas memang sudah membuat suatu kebijakan yang dibantu oleh satuan tugas (satgas) karena melihat kondisi lingkungan sekitar Lingga yang rawan akan hewan liar satu ini. Tugas dari satuan tugas salah satunya ialah untuk membantu dalam hal membersihkan kandang dan segala macam. Akan tetapi, karna satgas memiliki kesibukan masing-masing dan masyarakat pun belum ada yang mengomentari terkait masalah ini sehingga tempat penampungan dan lingkungan sekitar area kandang jauh dari kata bersih.

b. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam implementasi sangat diperlukan untuk menciptakan kerjasama dan hasil kebijakan yang diinginkan. Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah

program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain. Tidak hanya pada satu instansi terkait akan tetapi juga berkerjasama dengan berbagai pihak-pihak lain untuk keberhasilan suatu program tersebut.

Dalam pelaksanaan program pemerintah ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Kota Batam (BKSDA) dan bekerjasama juga dengan masyarakat dan membentuk suatu satuan tugas (satgas) untuk menjalankan program pengendalian satwa liar ini. Pihak dinas melakukan kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini untuk mengambil dan menyerahkan buaya-buaya yang sudah ada ditempat penampungan tersebut ke Pulau Bulan Kota Batam dan pihak dinas juga membuat satuan tugas agar mereka bisa membantu dalam hal penangkapan buaya dan menangani kasus-kasus buaya yang ada di Lingga. Untuk hubungan organisasi ke masyarakat, pihak dinas tidak pernah menyampaikan jika ada suatu program yang sudah dibuat untuk masalah pengendalian buaya ini, bahkan masyarakat merasa walaupun sudah ada program tetap saja buaya tidak berkurang dan bahkan semakin menambah.

c. Sumber Daya

Didalam suatu kebijakan pasti tidak lepas dari adanya sumber daya. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya yang kurang bisa menyebabkan gagalnya suatu kebijakan itu dijalankan. Untuk pelaksanaan kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup ini, pihak dinas mempunyai satuan tugas dimana para satuan tugas yang bekerja inilah yang menjadi faktor pendukung didalam implementasi program. Di setiap desa sudah ditetapkan satgas untuk menjalankan tugas ini, akan tetapi dengan jumlah satuan tugas yang masih kurang, pekerjaan mereka pun menjadi tidak maksimal dan juga untuk sumber daya finansial, pemerintah sudah banyak mengeluarkan dana untuk hal pembangunan saja.

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Dalam pengimplementasian suatu program, karakteristik dan kemampuan pelaksana kebijakan harus berkarakteristik keras dan tegas pada aturan. Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Bekerja didalam suatu kebijakan ini butuh seseorang yang sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menciptakan kinerja yang baik dan benar. Seseorang yang memiliki kemampuan tetapi tidak didasari dengan pengalaman akan sulit untuk merealisasikannya saat sudah turun lapangan.

IV. Kesimpulan

Terkait penelitian mengenai Implementasi Program Pengendalian Populasi Buaya Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga terlihat masih banyaknya kendala-kendala teknis dan oprasional yang dihadapi para implementator di lapangan atau para pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menimbulkan manfaat bagi masyarakat.

1. Dari dimensi kondisi lingkungan Kabupaten Lingga tidak ada penolakan dari masyarakat untuk dijalankan program ini dan dari lingkungan tempat penampungan buaya pun sudah cukup strategis walaupun jarak dengan kantor desa hanya 200 meter saja. Berdasarkan wawancara, kinerja dari pelaksana kebijakan kurang maksimal dikarenakan kandang yang jarang dibersihkan oleh satuan tugas sering menimbulkan bau amis disekitar kandang
2. Dari dimensi hubungan antar organisasi, berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa didalam pelaksanaan program dari Dinas Lingkungan Hidup, pihak dinas sudah

saling bekerjasama baik dengan Badan Konservasi Wilayah II Kota Batam maupun anggota satuan tugas untuk melakukan penangkapan di lingkungan permukiman masyarakat. Namun hubungan antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Karena kurangnya informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup.

3. Dari dimensi sumber daya, berdasarkan hasil wawancara bahwa sumber daya manusia didalam kebijakan pengendalian ini masih kurang sehingga pelaksana kebijakan sering kelelahan saat menghadapi buaya liar dan sumber daya finansial terhadap pelaksana kebijakan pun terbilang rendah bahkan tidak ada tunjangan yang diberikan.
4. Dari dimensi karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, berdasarkan hasil wawancara bahwa satuan tugas yang bekerja sudah terlihat sangat ahli dalam menghadapi buaya. Namun saat turun ke sungai lokasi titik kemunculan buaya, satuan tugas hanya menggunakan modal berani karena tidak memiliki pengamanan khusus untuk menjaga diri dari serangan buaya.

V. Daftar Referensi

Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta Dachi
- Rahmat Alyakin. 2017. *Proses dan analisis kebijakan kesehatan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang “Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing
- Firmansyah, Rikky. DKK. 2007. *Mudah dan aktif belajar biologi*. Jakarta: Pusat Perbukuan
- Fokusmedia. 2008. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pedoman Penyusunan Apbd Anggaran 2008-2009*. Bandung: Anggota Ikapi
- Kadji, Yulianto. 2015. *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK “Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas”*. Gorontalo: UNG Press-Anggota IKAPI
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi penelitian: skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Salim dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian untuk bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat
- Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditma
- Sore, Uddin B dan Subirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Subarsono, A. G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonom Daerah*. Yogyakarta : Deepublish
- Sunaryo, Karsam. 2018. *Sistem Pengendalian Manajemen dan Perilaku Disfungsional*. Bogor: Cergas Publika

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah :

Ditjen Perlindungan Hutan & Pelestarian Alam: 1993
PP RI No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Hayati Dan Ekosistem

Skripsi dan Jurnal

Bataren, Stevi, Patar Rumapea, dkk. 2016. Implementasi Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
Ripai, Ahmad, Legowo, Kamarubayana. 2016. Penangkaran Buaya Muara (*Crocodylus Porosus*) di Pt. Makmur Abadi Permai Samarinda Kalimantan Timur. *Jurnal AGRIFOR. Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*.
Wibowo, Ari, I Gusti Ayu K.R.H, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar Di Propinsi Jambi (Ditinjau Dari Hukum Dan Kebijakan Publik). *Skripsi. Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret. Jambi*
Ekapaksi, Bayu, Yustisianto. 2019. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gajah Liar Di Taman Nasional Way Kambas. *Skripsi. Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung*
Simange, Stella, Welson Y. Rompas, dkk. Implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia studi kasus pendidikan di desa yaro kecamatan tobelo timur kabupaten Halmahera utara.
Yuda, Oki, Oktami dan Eko Priy Purnomo. 2018. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Internet

<http://eprints.umm.ac.id/36598/3/jiptummpp-gdl-pradiptasu-50916-3>(diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pada pukul 17.35 WIB)
<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/538/jbptunikompp-gdl-iraquraisy-26896-3-unikom> (diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pada pukul 17.35 WIB)
[https://digilib.uns.ac.id/commit to user](https://digilib.uns.ac.id/commit-to-user) (diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pada pukul 17.15)

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Jamhur Poti, SE.,M.Si. Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan serta saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Okparizan, S.Sos.,M.HI.,M.Si selaku Pembimbing Pendamping sekaligus penasihat akademik yang telah membimbing memberikan saran, masukan dan yang telah memberikan nasihat kepada penulis pada penelitian skripsi ini.
3. Bapak Nirmansyah, S.Sos, Bapak Sanusi, Bapak Mahmud, Bapak Mukhtar Abu, Bapak Alian, Bapak Arian, Bapak Aras, Ibu Idar, Ibu Sepet, Ibu Mar terimakasih sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.